



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

**REPRESENTASI TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA PADA MATERI
MASA HINDU-BUDDHA: ANALISIS WACANA KRITIS**

Hendra Kurniawan¹, Nana Supriatna², Agus Mulyana²

¹*Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sanata Dharma*

²*Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia*

Correspondence: nanasup@upi.edu

To cite this article: Kurniawan, H., Supriatna, N., & Mulyana, A. (2023). Representasi tionghoa dalam buku teks sejarah indonesia pada materi masa hindu-buddha: analisis wacana kritis. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 6(2), 127-136. <https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.56182>.

Naskah diterima : 15 Maret 2023, **Naskah direvisi :** 20 September 2023, **Naskah disetujui :** 10 Oktober 2023

Abstract

The role of the Chinese in the history of the Hindu-Buddhist period appears in the Indonesian History textbook for class X SMA based on the 2013 Curriculum published by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The narrative is expected to discuss the values needed by students. For this reason, this study analyzes discourse practices built from the Chinese representations of Hindu-Buddhist material in the text book. The research used the Critical Discourse Analysis (CDA) method according to Teun A. van Dijk. The results of the study show that the narrative in the text dimension presents the role of the Chinese in a straightforward manner in terms of trade relations, the use of historical sources, and the spread of Buddhism. Social cognition displays the perception of the Chinese as influential immigrants to the history of the Indonesian nation. The social context is confronted with historical facts which give recognition that the Chinese are part of the Indonesian nation. The conclusion of the research confirms that the representation of Chinese in Indonesian History textbooks on material from the Hindu-Buddhist era carries the value of respect for diversity. In order for the internalization of these values to be optimal, the role of the teacher is very necessary.

Keywords: Critical discourse analysis; Hindu-Buddhist period; Indonesian history textbook; The Chinese.

Abstrak

Peran Tionghoa dalam sejarah masa Hindu-Buddha muncul dalam buku teks Sejarah Indonesia kelas X SMA berdasarkan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Narasi tersebut diharapkan mewacanakan nilai-nilai yang diperlukan siswa. Untuk itu, penelitian ini menganalisis praktik wacana yang dibangun dari representasi Tionghoa pada materi masa Hindu-Buddha dalam buku teks tersebut. Penelitian menggunakan metode analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan narasi pada dimensi teks menghadirkan peran Tionghoa secara lugas dalam hal relasi perdagangan, pemanfaatan sumber sejarah, dan penyebaran agama Buddha. Kognisi sosial menampilkan persepsi Tionghoa sebagai pendatang yang berpengaruh bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Konteks sosial dihadapkan dengan fakta-fakta sejarah yang memberi pengakuan bahwa Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Simpulan penelitian menegaskan bahwa buku teks Sejarah Indonesia pada materi zaman Hindu-Buddha menarasikan Tionghoa berikut perannya dengan mengusung nilai penghargaan terhadap kebinekaan. Agar internalisasi nilai tersebut optimal, maka peran guru sangat diperlukan.

Kata Kunci: Analisis wacana kritis; Buku teks; Hindu-Buddha; Sejarah Indonesia; Tionghoa.

PENDAHULUAN

Narasi sejarah resmi (*official history*) di banyak negara sangat bergantung pada dinamika politik pemerintah yang berkuasa (Huntington & Won, 2020; Kim & Kim, 2019; Wang, 2016). Dalam penulisan sejarah resmi di Indonesia, pemerintah Orde Baru menerbitkan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat eksklusif, propaganda, dan tafsir tunggal (Mulyana, 2013; Wood, 2013). Interpretasi kekuasaan sangat tampak dalam SNI dengan menempatkan Orde Baru sebagai penyelamat. Selain itu, penulisan sejarah nasional cenderung bersifat politis dan berpusat pada Jawa dengan meminggirkan peran sejarah berbagai kelompok masyarakat lainnya (Mulyana, 2017).

Salah satu narasi yang bermasalah dalam SNI sejak awal penulisannya yakni tentang peran Tionghoa dalam sejarah perjuangan bangsa. Atas nama asimilasi, berbagai hal yang berhubungan dengan Tionghoa ditanggalkan. Bahkan secara terstruktur dimunculkan “Masalah Cina” yang dianggap dapat mengancam integrasi bangsa yang harus diselesaikan melalui asimilasi sebagai solusi terbaik (Chua, 2004; Hoon, 2006; Purdey, 2003). Asimilasi membuat keberagaman dikorbankan atas nama persatuan melalui represi terhadap etnis Tionghoa (Hoon, 2006).

Dalam konteks program asimilasi pula, peran Tionghoa dalam sejarah bangsa tidak lagi diajarkan di sekolah. Selain itu, karya SNI juga telah menjadi rujukan utama bagi penulisan buku teks sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah sejak Kurikulum 1975. Akibatnya, Tionghoa tidak lagi dibicarakan dalam buku teks sejarah. Situasi ini berbeda dengan sebelum Orde Baru. Perang koalisi Tionghoa-Jawa melawan VOC 1740-1743 atau dikenal Geger Pacinan dan beberapa perlawanan daerah di Kalimantan yang melibatkan Tionghoa mendapat tempat dalam buku teks sejarah (Pane, 1950; Sanusi, 1955; Sundhoro, 1969; Suparno, 1960). Kenyataan ini menguatkan pendapat bahwa proses penerimaan terhadap Tionghoa memang menyimpan persoalan dibanding misalnya dengan keturunan Arab yang relatif lebih dapat diterima (Yulianti et al., 2022).

Interpretasi terhadap fakta sejarah, termasuk mengenai Tionghoa dalam buku teks masa Orde Baru sarat dengan kepentingan politik yang harus diterima sebagai kebenaran. Untuk itu, guru telah terbiasa berperan sebagai penyampai materi sejarah resmi yang berpihak pada otoritas atau hegemoni kekuasaan ketimbang kepentingan siswa (Supriatna, 2007). Suasana kaku gaya Orde Baru kerap masih terbawa dalam pembelajaran sejarah di masa sekarang. Akibatnya pembelajaran sejarah yang juga mengembangkan aspek

sikap menjadi kurang bermakna karena tidak optimal dalam internalisasi nilai untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer (Supriatna, 2007, 2008). Padahal sejak Reformasi, terutama dalam Kurikulum 2013, banyak terjadi perubahan paradigma dalam pembelajaran sejarah maupun penulisan buku teksnya.

Perubahan tersebut antara lain peran Tionghoa ditulis secara eksplisit dalam buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hadirnya kembali narasi seputar Tionghoa seiring dengan terbitnya SNI Edisi Pemutakhiran tahun 2008. Disusul tahun 2012 muncul buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang menawarkan alternatif lebih ramah terhadap minoritas, termasuk Tionghoa (Kwartanada, 2020). Dalam buku teks Sejarah Indonesia yang terbit pada tahun 2017 dan 2018 itu, pembicaraan tentang peran Tionghoa maupun relasi dengan Tiongkok muncul dalam beberapa pokok bahasan. Salah satunya dalam narasi masa Hindu-Buddha pada buku teks Sejarah Indonesia kelas X SMA.

Buku teks yang diterbitkan pemerintah selain menjadi buku pegangan wajib juga merepresentasikan sikap negara. Misi pemerintah tampak dalam interpretasi narasi yang dibangun di dalamnya (Mulyana, 2013). Kehadiran buku teks Sejarah Indonesia yang merepresentasikan Tionghoa menunjukkan tanggapan terhadap perkembangan sosial politik yang berubah setelah Orde Baru tumbang. Sejak Reformasi, penerimaan terhadap Tionghoa semakin positif dan terbuka. Hal ini mengandaikan kehadiran narasi tentang Tionghoa dalam buku teks juga mengusung paradigma tersebut. Representasi Tionghoa dalam narasi-narasi pada buku teks Sejarah Indonesia diharapkan mewacanakan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengenalan dan penghargaan terhadap keberagaman hingga penghilangan stereotipe dan prasangka.

Artinya pendidikan multikultural atau kebinekaan diharapkan menjadi wacana utama yang tampil dalam pembelajaran pada materi-materi yang mengungkap peran Tionghoa. Wacana multikulturalisme atau kebinekaan dalam buku teks sejarah selama ini cukup banyak diteliti (Djono & Joebagio, 2019; Tricahyono et al., 2020; Utami & Widiadi, 2016). Semua penelitian tersebut menghadirkan kajian secara umum tanpa terpancang pada aspek atau bagian tertentu dari konstruksi keberagaman di Indonesia. Sementara beberapa penelitian lain yang mengusung aspek tertentu terkait keberagaman dalam buku teks antara lain tentang representasi perempuan maupun suku (Briliani, 2016; Handoko & Wasino, 2020; Pranandari, 2018). Akan tetapi, belum didapati penelitian yang secara khusus menaruh fokus pada representasi Tionghoa.

Hal lain yang memperkuat alasan perlunya penelitian ini berangkat dari wacana umum tentang Tionghoa yang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini konstruksi wacana tentang Tionghoa yang diwariskan Orde Baru masih membekas dan sentimen anti-Cina kerap juga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (Kristiono, 2018; Kuntjara & Hoon, 2020). Apalagi perkembangan media sosial yang semakin pesat turut berperan dalam mereproduksi persepsi stereotipe, prasangka, dan kebencian terhadap Tionghoa. Situasi ini menciptakan kegelisahan.

Representasi Tionghoa dalam buku teks pada Kurikulum 2013 dapat dikatakan menjadi hal baru yang menyimpan persoalan. Para penulis buku teks dan guru yang masih memiliki memori episodik Orde Baru dalam mempersepsikan Tionghoa akan berpotensi mengalami pergulatan dalam mewacanakan representasi Tionghoa. Sementara siswa sebagai generasi baru menantikan produksi wacana yang konstruktif untuk masa depan hidup berbangsa yang lebih baik.

Untuk itu, penelitian ini diperlukan guna membongkar wacana yang dibangun dalam narasi tentang Tionghoa pada buku teks Sejarah Indonesia. Dari studi tersebut dapat diperoleh beragam manfaat. Para penulis buku teks Sejarah Indonesia berkesempatan memikirkan dan menuliskannya kembali secara lebih inklusif. Bagi para guru sejarah dapat membantu untuk menentukan strategi pembelajaran yang efektif pada materi yang merepresentasikan Tionghoa agar mengoptimalkan upaya internalisasi nilai. Metode yang banyak digunakan dalam penelitian serupa dan dirasa paling tepat yakni analisis wacana kritis. Tidak hanya elemen tekstual yang dianalisis namun juga kognisi sosial dalam produksi teks dan konteks sosialnya. Hal ini dianggap relevan karena wacana tentang Tionghoa yang berkembang di masyarakat tidak secara keseluruhan telah melepaskan diri dari simpul jerat perspektif Orde Baru.

Penelitian ini secara khusus menganalisis praktik wacana yang dibangun dari representasi Tionghoa pada materi masa Hindu-Buddha. Materi ini hadir dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk kelas X SMA terbitan Kemendikbud RI tahun 2017. Pemilihan materi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kontak awal dan kedatangan Tionghoa di kawasan Nanyang (Nusantara) terjadi sekitar abad ke-5 Masehi. Artinya gelombang kedatangan Tionghoa dalam jumlah yang signifikan mulai terjadi pada masa Hindu-Buddha. Permukiman Tionghoa mulai terbentuk dan peran mereka bagi perjalanan sejarah bangsa mulai tampak. Analisis wacana tentang Tionghoa yang dikonstruksi pada materi periode ini diharapkan dapat memberi gambaran awal

bagi representasi Tionghoa dalam periode-periode sejarah selanjutnya pada buku teks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis atau dikenal sebagai *Critical Discourse Analysis* (CDA). Metode analisis wacana ini bermaksud melihat dan membongkar praktik ideologi yang terdapat dalam teks (Eriyanto, 2001). Sebagai subjek analisis yaitu teks materi tentang era Hindu-Buddha yang terdapat dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA kelas XI semester 1 berdasarkan Kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud RI tahun 2017. Data dikumpulkan dengan cara membaca, memahami isi, dan menandai bagian-bagian penting dari dokumen teks yang menjadi subjek penelitian. Untuk itu, didasarkan pada human instrumen sebagaimana dalam penelitian kualitatif, maka peneliti dengan kemampuannya menggali makna dari keseluruhan teks yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan mengacu pada model kognisi sosial menurut Teun A. van Dijk. Penelitian tidak hanya didasarkan pada analisis teks semata karena teks merupakan hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati (Eriyanto, 2001; Haryatmoko, 2019). Untuk itu, ada tiga dimensi yang dianalisis yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Dijk, 1994). Dimensi teks terkait dengan struktur teks dan strategi wacana untuk menegaskan suatu tema. Dimensi kognisi sosial melibatkan kognisi atau mental penulis. Dimensi konteks sosial mempelajari konstruksi wacana terkait yang berkembang dalam masyarakat (Eriyanto, 2001; Haryatmoko, 2019). Ketiga dimensi wacana tersebut merupakan suatu kesatuan yang mengarah pada analisis komprehensif tentang bagaimana dan untuk apa teks tersebut diproduksi. Hasil analisis kemudian disajikan dan ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Teks

Analisis pada dimensi teks mengkaji strategi wacana yang digunakan untuk menggambarkan Tionghoa pada narasi masa Hindu-Buddha dalam buku teks. Analisis meliputi struktur makro atau tematik, superstruktur atau skematis, dan struktur mikro yakni semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik. Tematik terkait dengan tema-tema yang merepresentasikan Tionghoa pada narasi. Skematis tentang urutan narasi dalam teks. Semantik terkait dengan makna teks, sintaksis tentang susunan kalimat, stilistika tentang pilihan kata, dan retorik terkait dengan

penekanan hal-hal yang hendak ditonjolkan (Eriyanto, 2001).

Analisis struktur makro menunjukkan Tionghoa dalam narasi masa Hindu-Buddha direpresentasikan pada tiga tema yaitu relasi perdagangan, pemanfaatan sumber sejarah, dan penyebaran agama Buddha. Dalam relasi perdagangan, Tionghoa muncul pada narasi Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara. “Dalam masa itulah para pedagang datang dari India, Cina dan Arab untuk meramaikan Sriwijaya. ... “Pada masa itu pula hubungan dengan India dan Cina berkembang pesat” (Gunawan et al., 2017, hlm. 76). “Interaksi dengan kedua bangsa itu [India dan Cina] membawa perubahan pada bentuk tata negara di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia. Juga perubahan dalam susunan kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Sejak saat itu pula pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia” (Gunawan et al., 2017, hlm. 78). Sementara dalam penjelasan Tarumanegara ditulis “... pada masa Dinasti T’ang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah” (Gunawan et al., 2017, hlm. 94).

Hubungan perdagangan pada taraf lebih lanjut terkait dengan politik bilateral kedua negara. Hal ini ditulis dalam narasi Kerajaan Singasari dan Majapahit. Penguasaan daerah-daerah di luar Jawa yang merupakan pelaksanaan politik luar negeri bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Cina. ... Kertanegara memandang Cina sebagai saingan. Berkali-kali utusan Kaisar Cina memaksa Kertanegara agar mengakui kekuasaan Cina, tetapi ditolak oleh Kertanegara. Terakhir pada tahun 1289 M datang utusan Cina yang dipimpin oleh Mengki. Kertanegara marah, Mengki disakiti dan disuruh kembali ke Cina. Hal inilah yang membuat marah Kaisar Cina yang bernama Kubilai Khan (Gunawan et al., 2017, hlm. 133).

Hubungan bilateral Tiongkok dengan Majapahit dituliskan dalam dua perihal. *Pertama*, “Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok” (Gunawan et al., 2017, hlm. 138). *Kedua*, “Hubungan dengan Siam, Birma, Kamboja, Anam, India, dan Cina berlangsung dengan baik. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Majapahit mengenal motto Mitreka Satata, artinya negara sahabat” (Gunawan et al., 2017, hlm. 140). Masih dalam tema relasi perdagangan, narasi juga memaparkan tentang jaringan Nusantara yang terbentuk melalui perdagangan, selain dengan India juga Cina. Gunawan et al. (2017, hlm. 151–152) memaparkannya sebagai berikut.

Jika pada masa praaksara hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara Daratan, maka pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya. Keduanya merupakan dua kekuatan super power pada masanya dan mempunyai pengaruh amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia. ... Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. ... Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara, dan dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama “jalur sutra”. ... Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina (Sumatra Utara sekarang).

Tema hubungan dagang merupakan narasi yang biasa disampaikan ketika membicarakan Tionghoa dalam periode Hindu-Buddha. Narasi sejarah resmi (SNI) menulis keberhasilan bangsa Indonesia (melalui kerajaan-kerajaan era Nusantara) menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok merupakan tonggak sejarah bangsa (Poesponegoro & Notosusanto, 2008, hlm. 20). Narasi dalam IDAS juga menyampaikan tema relasi dagang dengan menyebut tentang teknologi pelayaran dan bandar-bandar dagang penting yang disinggahi para pedagang Tionghoa di kawasan Selat Malaka (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 88, 91). Narasi IDAS juga menyebut bahwa hubungan pelayaran dan perdagangan langsung antara Nusantara-Tiongkok terjadi sejak abad ke-3 hingga 5 (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 310). Berbagai karya historiografi lain juga menulis banyaknya peninggalan keramik dari Tiongkok yang dijumpai di Indonesia menjadi bukti hubungan dagang keduanya (Intisari & Indonesia, 2018; Lombard, 1996; Suryadinata, 2016).

Narasi hubungan dagang yang bermuara pada politik bilateral juga diungkap dalam SNI dan IDAS. Narasi SNI membangkitkan perasaan emosional tentang sikap Kertanegara yang memandang Tiongkok sebagai pesaing politik (Poesponegoro & Notosusanto, 2008, hlm. 414, 417). Narasi yang sama ditampilkan dalam buku teks. Sementara IDAS lebih menekankan upaya-upaya Kertanegara memperkuat posisi Singasari dalam menghadapi upaya ekspansi Kubilai Khan (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 232–233). Narasi IDAS lebih konstruktif dalam menanamkan pentingnya

kedaulatan negara ketimbang narasi SNI maupun buku teks yang menampilkan nuansa emosional, perang, dan perpecahan. Motto Mitreka Satata yang muncul dalam narasi buku teks tentang Majapahit juga dijumpai dalam IDAS (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 24).

Tema menonjol berikutnya pada periode ini, catatan atau berita perjalanan para musafir Tionghoa yang dimanfaatkan sebagai sumber sejarah. Pemanfaatan berita Cina, demikian disebut, muncul dalam narasi Kerajaan Kalingga, Sriwijaya, Mataram Kuno, Kediri, Buleleng, Dinasti Warmadewa di Bali, dan Tulang Bawang. Sumber utama sejarah Kerajaan Kalingga diketahui dari berita Dinasti Tang yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kalingga (Gunawan et al., 2017, hlm. 97). Selain prasasti, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya mengandalkan berita I-tsing yang pernah bermukim di Sriwijaya (Gunawan et al., 2017, hlm. 102). Kehidupan keseharian masyarakat di Kerajaan Kediri terekam dalam kitab *Ling-wai-tai-ta* (Gunawan et al., 2017, hlm. 127). Bahkan temuan yang paling signifikan tampak dalam narasi Kerajaan Tulang Bawang. Hampir seluruhnya didominasi oleh sumber dari berita Cina, antara lain kitab *Liu-sung Shu*, kitab *Tai-ping Huang-yu-chi*, dan petunjuk pelayaran *Wu-pei-chih* (Gunawan et al., 2017, hlm. 146–147).

Pemanfaatan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan kedatangan Tionghoa ke Nusantara juga diungkap dalam SNI. Dikatakan bahwa sumber-sumber berita Cina sangat berlimpah ketimbang sumber-sumber yang terkait dengan India, namun interpretasinya tidak mudah, barangkali karena kendala bahasa (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). Beberapa narasi terkait dengan sumber berita Cina dalam buku teks juga ditemukan dalam IDAS. Antara lain mengenai kerajaan Tarumanegara yang disebut Tolomo (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 50). Malahan narasi Kerajaan Tulang Bawang dalam buku teks sama persis dengan IDAS tanpa ditambahkan sumber-sumber lain (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 54–55).

Tema terakhir yang terkait Tionghoa yakni penyebaran agama Buddha. "... seorang pendeta Buddha yang bernama Atisa, belajar Agama Buddha di Sriwijaya selama 12 tahun, atas saran I-tsing, seorang musafir dari Cina yang lebih dahulu pernah singgah di Sriwijaya" (Gunawan et al., 2017, hlm. 77). "Bahkan pendeta Cina yang bernama Hwi-ning datang di Kalingga dan tinggal selama tiga tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Hwi-ning dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabadra" (Gunawan et al., 2017, hlm. 98). Narasi pada materi Kerajaan Sriwijaya dan Kalingga ini memberi

informasi menarik bahwa para pendatang Tionghoa yang beragama Buddha itu sempat bermukim. Artinya hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemukim-pemukim Tionghoa lainnya. Apalagi dalam urusan hubungan perdagangan.

Kedua narasi tentang penyebaran agama Buddha ini juga diungkap dalam SNI dan IDAS. Jika dicermati, tampak apabila Sriwijaya dan Kalingga justru menjadi tempat belajar dan pengembangan pengetahuan agama Buddha. Hal ini disampaikan dalam SNI bahwa hingga permulaan abad ke-9, Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha bertaraf internasional. Bahkan kabarnya Sriwijaya pernah mengirim utusan ke Tiongkok untuk menyampaikan berita bahwa di Sriwijaya didirikan bangunan suci agama Buddha yang dinamai Chen-tien-wa-shou untuk mendoakan agar kaisar panjang umur (Poesponegoro & Notosusanto, 2008, hlm. 68). Narasi ini sebenarnya menguatkan gagasan bahwa perkembangan agama Buddha di Nusantara kala itu terkait erat dengan peran Tionghoa dan relasi dengan Tiongkok. Meskipun pernyataan yang eksplisit tentang ini hampir tidak pernah dijumpai dalam buku teks sejarah.

Terkait perkembangan agama Buddha, dalam narasi Kerajaan Majapahit, buku teks menambahkan tentang motto Bhinneka Tunggal Ika. "Kehidupan beragama di Majapahit berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu maupun Buddha saling bersatu. Pada masa itu pun sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya, sekalipun berbeda-beda baik Hindu maupun Buddha pada hakikatnya adalah satu jua. Kemudian secara umum kita artikan berbeda-beda akhirnya satu jua" (Gunawan et al., 2017, hlm. 140). Narasi ini menguatkan pandangan bahwa situasi masyarakat yang beragam sudah ada sejak era Hindu-Buddha. Keberagaman itu tidak menjadi persoalan, masyarakat hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu unsur keberagaman itu adalah pengaruh budaya yang dibawa orang-orang Tionghoa, termasuk perkembangan agama Buddha. Narasi ini secara jelas mengusung nilai kebinekaan untuk disampaikan kepada siswa.

Buku teks secara lugas menegaskan bahwa relasi dengan Tiongkok beserta pengaruh budayanya membentuk jaringan Nusantara. "Kebudayaan India dan Cina ketika itu jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar Selat Malaka" (Gunawan et al., 2017, hlm. 153). Pengaruh Tionghoa juga ditunjukkan melalui gambar relief terakota yang disebut menggambarkan paras muka orang Cina (Gunawan et al., 2017, hlm. 155). Buku teks juga mendorong siswa untuk mencari tahu pengaruh budaya Tionghoa dalam bidang kuliner melalui pertanyaan uji kompetensi

(Gunawan et al., 2017, hlm. 157). Banyak makanan yang menjadi konsumsi sehari-hari di masyarakat mendapat pengaruh Tionghoa. Misalnya tahu yang dibawa orang Tionghoa asal Hokkian, *tau-hu*, sudah disebut dalam prasasti Watukara dari Jawa Timur tahun 902 M (Rahman, 2016, hlm. 20). Lombard (1996) mengungkap beragam jenis bahan makanan mentah seperti kucai, lokio, lobak, caisim, kailan, cincau, lengkung, hingga lici juga dikenalkan orang-orang Tionghoa. Demikian pula dengan peralatan memasak dan cara memasak seperti ca, tim, dan kuah.

Sebenarnya tidak hanya urusan perut, pengaruh Tionghoa juga banyak dijumpai dalam pakaian, gaya hidup, dan tradisi yang turun-temurun. Perkawinan orang Tionghoa dengan perempuan setempat mendorong munculnya budaya peranakan atau budaya baba-nyonya yang lekat dengan masyarakat sekarang ini (Kurniawan et al., 2023; Lee, 2016; Neo et al., 2020). Sisi akulturasi budaya Tionghoa semacam ini perlu dihadirkan dalam buku teks. Setidaknya guru membuka ruang diskusi yang luas tentang itu agar menumbuhkan kesadaran kebinekaan secara kontekstual dalam diri siswa. Inilah kekayaan bangsa yang telah ada sejak zaman dulu, dipelajari melalui sejarah, dan harus dipelihara dengan baik sekarang ini dalam keharmonisan hidup bersama.

Dengan mencermati analisis tematik, dapat diperoleh pemahaman tentang skema teks dalam membentuk kesatuan arti. Inilah yang disebut analisis superstruktur atau skematis yang menunjukkan gagasan tentang Tionghoa sebagai pendatang dengan pengaruhnya yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Narasi pada periode Hindu-Buddha dalam buku teks ini memberi pengakuan terhadap eksistensi dan peran Tionghoa. Kendati disampaikan secara lugas, namun peran itu sebenarnya dibatasi dengan fokus utama pada urusan dagang. Bermula dari aktivitas perdagangan itulah Tionghoa memberi sumbangsih yang terkait dengan sumber sejarah dan perkembangan agama Buddha. Padahal ada aspek kehidupan bermasyarakat yang lebih luas lagi yang mendapat pengaruh Tionghoa, namun tidak mendapat ruang yang cukup dalam buku teks.

Berikutnya analisis struktur mikro semakin menunjukkan sisi lebih dalam dari teks yang perlu dibenahi agar wacana kebinekaan lebih ditampilkan. Pertama, semantik mengarah pada predikat pendatang dan pedagang yang disematkan pada Tionghoa. Jika tidak hati-hati, narasi pendatang dapat menguatkan anggapan Tionghoa sebagai *the other*. Ini semakin menjauhkannya dari penerimaan sebagai bagian bangsa Indonesia seutuhnya. Sementara narasi pedagang akan

meneguhkan pandangan *economic animal* yang selama ini ditujukan pada kalangan Tionghoa. Kenyataan Tionghoa sebagai pendatang dan pedagang memang fakta sejarah yang tidak dapat ditolak. Akan tetapi, dalam konteks pendidikan kebinekaan, reproduksi makna semacam ini harus digantikan dengan fakta sejarah lain bahwa Tionghoa telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan tidak hanya berperan dalam urusan ekonomi saja (Kong, 1999; Mahfud, 2013; Setiono, 2008).

Kedua, sintaksis dalam teks periode Hindu-Buddha menonjolkan koherensi pada narasi tentang sumber sejarah Sriwijaya dan Mataram Kuno. Pertalian kalimat yang dimunculkan menguatkan peran berita Cina sebagai sumber sejarah yang penting dan menentukan selain prasasti. Makna yang hendak disampaikan yakni kedatangan Tionghoa berkontribusi dalam mendokumentasikan kehidupan masyarakat pada masa lalu yang dapat menjadi rujukan sekarang ini. Pada elemen sintaksis, Tionghoa kerap ditempatkan sebagai subjek kendati hanya mengarah pada aktivitasnya sebagai pendatang dan pedagang.

Ketiga, stilistika atau pilihan kata dalam narasi periode Hindu-Buddha paling kentara pada penggunaan istilah "Cina". Dalam narasi, "Cina" merujuk pada dua hal sekaligus yakni orang-orang Tionghoa dan negara Tiongkok. Contohnya "berita Cina" dapat dimaksudkan sebagai berita yang ditulis atau menginformasikan tentang orang-orang Tionghoa, namun dapat dimaknai pula sebagai berita dari negeri Tiongkok. Pada periode ini, istilah "Cina" memang bernuansa netral dan tidak mengandung sentimen negatif. Istilah "Cina" berkonotasi buruk sejak era kolonial yang mengarah pada kebencian rasialis (Lembong, 2011). Selanjutnya, Orde Baru berperan meneruskannya lewat Seminar Angkatan Darat II tanggal 25-31 Agustus 1966 di Bandung yang mengusulkan istilah Cina digunakan untuk mengurangi atau menghapus perasaan superior dan inferior antara Tionghoa dengan pribumi (Lembong, 2011; Setiono, 2008; Suryadinata, 2002).

Keempat, elemen retorik dalam narasi periode Hindu-Buddha ditunjukkan melalui elemen grafis yakni gambar relief terakota yang menggambarkan paras muka orang Tionghoa (Gunawan et al., 2017, hlm. 155). Hal ini menjadi pembuktian bahwa relasi antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan orang-orang dari Tiongkok memang telah terjalin lama dan mendalam. Orang-orang Tionghoa telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat dan tentu saja memiliki pengaruh yang lekat dalam masyarakat. Ini menguatkan kenyataan bahwa Tionghoa telah bermukim, bercampur, dan melakukan perkawinan dengan penduduk setempat.

2. Dimensi Kognisi Sosial

Kognisi sosial dimaknai atas dasar asumsi bahwa setiap teks dihasilkan melalui kesadaran, pengetahuan, pandangan, stereotipe, atau prasangka tertentu atas suatu peristiwa (Eriyanto, 2001). Teks merupakan struktur mikro, sementara masyarakat merupakan struktur makro. Kedua hal ini dijumpai dengan kognisi sosial yang menggambarkan struktur mental dari penulis teks (Dijk, 1994). Untuk itu, penulisan buku teks dihadapkan pada model atau skema penulisan yang menjadi standar tertentu dari suatu karya untuk kepentingan pendidikan beserta pengetahuan, pandangan, dan nilai yang dibawa penulis.

Penulisan buku teks Sejarah Indonesia yang dianalisis ini dihadapkan pada konteks model yakni Kurikulum 2013 dan sejarah resmi yang diejawantahkan dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS. Kedua skema ini menjadi standar isi dari pembelajaran Sejarah Indonesia. Selain juga terikat oleh aturan penulisan buku teks yang berhubungan dengan urusan teknis sebagaimana diatur oleh pemerintah. Dokumen Kurikulum 2013 tidak memberi advis khusus mengenai representasi Tionghoa. Akan tetapi, penulisan buku teks Sejarah Indonesia ini menunjukkan upaya menjawab dinamika perubahan masyarakat yang mengarah pada sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap Tionghoa.

Elemen berikutnya yang berkaitan dengan penulis adalah memori. Para penulis buku teks ini diketahui memiliki memori jangka panjang, semantik maupun episodik, yang terkait dengan Orde Baru. Hampir separuh kehidupan mereka dijalani sepanjang pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, pada era Reformasi, sebagian penulis buku teks ini terlibat dalam penulisan IDAS yang memberi perspektif baru dalam memandang Tionghoa. Untuk itu, narasi-narasi yang berasal dari IDAS lebih kerap digunakan dalam penulisan buku teks ketimbang SNI Edisi Pemutakhiran maupun sumber-sumber lain.

Secara umum, kognisi sosial yang diproduksi oleh narasi periode Hindu-Buddha dalam buku teks menunjukkan Tionghoa sebagai pendatang yang memberi pengaruh bagi perkembangan sejarah Indonesia. Kendati demikian, pergulatan dan tarik-menarik antara kognisi sosial penulis dan kebaruan yang ditawarkan IDAS masih tampak dalam wacana kebinekaan yang dikonstruksi dalam buku teks. Untuk itu, peran guru sangat menentukan dalam interpretasi buku teks. Guru diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dengan tidak mereproduksi kognisi sosial yang mengarah pada wacana stereotipe, prasangka, maupun anggapan destruktif tentang Tionghoa.

3. Dimensi Konteks Sosial

Dimensi konteks sosial berkontribusi dalam membentuk kognisi sosial. Penulis buku teks dan siswa merupakan bagian dari masyarakat yang dapat mengokohkan maupun membentuk kognisi sosial baru di masyarakat. Pada akhirnya kognisi sosial itulah yang akan membangun konteks sosial masyarakat. Untuk itu, kelompok yang lebih berkuasa dengan akses yang lebih luas akan memiliki kesempatan yang lebih besar pula dalam membentuk pandangan umum masyarakat (Eriyanto, 2001).

Dalam konteks itulah kekuasaan dan akses paling kuat dalam mengontrol kesadaran masyarakat dimiliki oleh negara. Pembentukan konteks sosial masyarakat terhadap Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari latar historis. Stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa yang berujung pada sentimen anti-Cina merupakan warisan kolonial yang diteruskan pada masa Orde Baru (Wasino et al., 2019). Melalui program asimilasi, pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai aturan yang mendiskriminasi Tionghoa (Sunny Lie & Bailey, 2016). Konteks sosial yang dibangun selama lebih dari tiga dekade ditambah sisa warisan kolonial yang belum sempat lenyap membuatnya mengakar dalam masyarakat.

Wacana baru dalam memandang Tionghoa yang dibangun melalui Reformasi tidak begitu saja berhasil mengubah kognisi sosial masyarakat yang kadung lekat itu. Pertarungan wacana lama dan baru inilah yang tampil pada penulisan buku teks dalam merepresentasikan Tionghoa. Segall et al. (2018, hlm. 285) menuliskan "History, they [sejarawan dan para filsuf sejarah yang bersikap kritis] argue, is not a mirror to the past but a positioned, value-laden, discursive inscription that requires exposing its 'made up' nature". Pemikiran Segall ini menegaskan bahwa narasi sejarah senantiasa diposisikan untuk menceritakan kisah masa lalu dari waktu, tempat, dan perspektif tertentu. Makna yang diberikan pada masa lalu tidak pernah objektif karena selalu diposisikan dan memosisikan.

Konteks sosial ini perlu dipahami dalam mengkritisi buku teks sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Pemanfaatan buku teks begitu saja dapat menjurus pada kegagalan mengonstruksi nilai kebinekaan yang ditampilkan oleh materi yang merepresentasikan Tionghoa. Apalagi temuan Djono & Joebagio (2019) menegaskan kecenderungan guru sejarah yang lebih mengartikulasikan pentingnya persatuan ketimbang menumbuhkan kesadaran terhadap kebinekaan yang membentuk persatuan itu. Pada taraf lebih lanjut, sikap kritis guru sejarah diharapkan mampu

mendorong siswa mengonstruksi dan menyebarkan wacana kebinekaan tentang Tionghoa di tengah masyarakat.

SIMPULAN

Representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia pada materi zaman Hindu-Buddha mengungkap nilai penghargaan terhadap kebinekaan. Dimensi teks menunjukkan adanya pengakuan yang lugas terhadap peran Tionghoa, kendati terbatas pada hubungan perdagangan, pemanfaatan sumber sejarah, dan penyebaran agama Buddha. Kognisi sosial menampilkan Tionghoa sebagai pendatang yang berpengaruh bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Fakta sejarah ini dihadapkan dengan konteks sosial yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, peran guru turut menentukan agar membuka ruang diskusi yang lebih luas pada beragam bidang yang menunjukkan peran dan pengaruh Tionghoa dalam membentuk kebinekaan bangsa. Guru perlu mengupayakan pembelajaran sejarah yang bermakna dalam menginternalisasikan nilai kebinekaan untuk integrasi bangsa pada diri siswa. Wacana yang lebih konstruktif terhadap Tionghoa sebagai kognisi sosial siswa perlu diciptakan karena turut membentuk konteks sosial di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah, T., & Lopian, A. B. (Eds.). (2012). *Indonesia dalam arus sejarah jilid 2: kerajaan hindu-buddha*. PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Briliani, A. M. (2016). *Analisis wacana kritis: representasi perempuan dalam buku teks sejarah indonesia berdasarkan kurikulum 2013 kelas x, xi dan xii sekolah menengah atas*. Universitas Negeri Malang.
- Chua, C. (2004). Defining indonesian chineseness under the new order. *Journal of Contemporary Asia*, 34(4), 465–479. <https://doi.org/10.1080/00472330480000221>
- Dijk, T. A. van. (1994). Discourse and cognition in society. In D. Crowley & D. Mitchell (Eds.), *Communication theory today* (pp. 107–126). Stanford University Press.
- Djono, & Joebagio, H. (2019). Narration and discourse of bhinneka tunggal ika in indonesia revised history textbook: a history didactics approach. *Paramita: Historical Studies Journal*, 29(1), 18–27. <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i1.15311>

- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Gunawan, R., Lestariningsih, A. D., & Sardiman, A. M. (2017). *Sejarah indonesia sma/ma/smk/mak kelas x*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Handoko, S. T., & Wasino. (2020). Discourse on relations between indonesia and papua: content analysis of history textbook of 2013 curriculum. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(1), 23–35. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i1.16215>
- Haryatmoko. (2019). *Critical discourse analysis (analisis wacana kritis): landasan teori, metodologi, dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Hoon, C.-Y. (2006). Assimilation, multiculturalism, hybridity: the dilemmas of the ethnic chinese in post-suharto indonesia. *Asian Ethnicity*, 7(2), 149–165. <https://doi.org/10.1080/14631360600734400>
- Huntington, A., & Won, C. (2020). What it means to be korean: national identity in north and south korean elementary textbooks 1960–2019. *Comparative Education*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/03050068.2020.1812237>
- Intisari, & Indonesia, K. L. B. (2018). *Peranakan tionghoa indonesia: sebuah perjalanan budaya* (A. H. Kustara (ed.); 3 (diperba). PT Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya Indonesia.
- Kim, H., & Kim, S. K. (2019). Global convergence or national identity making?: the history textbook controversy in south korea 2004–2018. *Asia Pacific Journal of Education*, 39(2), 252–263. <https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1621801>
- Kong, Y. (1999). *Silang budaya tiongkok-indonesia*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kristiono, M. J. (2018). Dari tionghoa ke tjina: telaah sejarah terhadap demonisasi etnis tionghoa di indonesia. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(19), 34–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i19.1309>
- Kuntjara, E., & Hoon, C.-Y. (2020). Reassessing chinese indonesian stereotypes: two decades after reformasi. *South East Asia Research*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1729664>
- Kurniawan, H., Supriatna, N., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2023). Content analysis of the little nyonya for learning resources in history education. In R. Ridhoi, A. Subekti, F. M. Navarro, & Hariyono (Eds.), *Embracing New Perspectives in History, Social Sciences, and Education* (pp. 64–68). Routledge.

- <https://doi.org/10.1201/9781003295273-13>
Kwartanada, D. (2020). Diingat sekaligus dihapuskan: “cina” dalam memori kolektif dan historiografi orde baru. *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 39(2), 12–33.
- Lee, T. (2016). Defining the aesthetics of the nyonyas’ batik sarongs in the straits settlements, late nineteenth to early twentieth century. *Asian Studies Review*, 40(2), 173–191. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1162137>
- Lembong, E. (2011). *Istilah “cina”, “china”, dan “tionghoa”: tinjauan historis dan masalah penggunaannya dewasa ini*. Yayasan Nabil.
- Lombard, D. (1996). *Nusa jawa: silang budaya jaringan asia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, C. (2013). *Manifesto politik tionghoa di indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, A. (2013). Nasionalisme dan militerisme: ideologisasi historiografi buku teks pelajaran sejarah sma. *Paramita Historical Studies Journal*, 23(1), 78–87. <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i1.2498>
- Mulyana, A. (2017). Multikulturalisme dalam buku teks pelajaran sejarah sma suatu kajian historiografi. In S. Margana, Baha’Uddin, & A. Faisol (Eds.), *Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia* (pp. 1–21). Penerbit Ombak.
- Neo, D. H., Ngo, S.-S., & Heng, J. G. K. (2020). Popular imaginary and cultural constructions of the nonya in peranakan chinese culture of the straits settlements. *Ethnicities*, 20(1), 24–48. <https://doi.org/10.1177/1468796819867399>
- Pane, S. (1950). *Sedjarah indonesia (Djilid 1)*. Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008). *Sejarah nasional indonesia ii: zaman kuno (edisi pemutakhiran -cet.2-)* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa (eds.)). Balai Pustaka.
- Pranandari, N. (2018). *Bias gender dan marginalisasi perempuan dalam buku teks sejarah sma (sebuah studi analisis wacana pada buku teks sejarah indonesia sma kelas x)*. Universitas Negeri Malang.
- Purdey, J. (2003). Political change reopening the asimilasi vs integrasi debate: ethnic chinese identity in post-suharto indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 421–437. <https://doi.org/10.1080/1343900032000117231>
- Rahman, F. (2016). *Jejak rasa nusantara: sejarah makanan indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sanusi, A. (1955). *Sedjarah Indonesia untuk Sekolah Menengah II* (7th ed.). Pustaka “Pakuan.”
- Segall, A., Trofanenko, B. M., & Schmitt, A. J. (2018). Critical Theory and history education. In S. A. Metzger & L. M. Harris (Eds.), *the wiley international handbook of history teaching and learning* (pp. 283–309). Wiley Blackwell.
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam pusaran politik*. TransMedia.
- Sundhoro. (1969). *Sedjarah indonesia II*. P.P. Adil.
- Sunny Lie, & Bailey, B. (2016). The power of names in a Chinese Indonesian family’s negotiations of politics, culture, and identities. *Journal of International and Intercultural Communication*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/17513057.2016.1216577>
- Suparno. (1960). *Sedjarah indonesia iii: achir v.o.c. hingga pemerintahan inggeris*. Sari Pers.
- Supriatna, N. (2007). *Konstruksi pembelajaran sejarah kritis*. Historia Utama Press.
- Supriatna, N. (2008). Dekonstruksi sejarah perang kerajaan-kerajaan islam di asia tenggara dalam pedagogi sejarah. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 103–120.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan etnis tionghoa: kasus indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suryadinata, L. (2016). *Tionghoa dalam keindonesiaan: peran dan kontribusi bagi pembangunan bangsa jilid i* (L. Suryadinata (ed.)). Yayasan Nabil.
- Tricahyono, D., Sariyatun, & Ediyono, S. (2020). Analisis wacana kritis pendidikan multikultural dan pendidikan nilai dalam buku teks sejarah sma. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/socia.v17i1.32294>
- Utami, I. W. P., & Widiadi, A. N. (2016). Wacana bhineka tunggal ika dalam buku teks sejarah. *Paramita Historical Studies Journal*, 26(1), 106–117. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5150>
- Wang, D. (2016). Learning or becoming: ideology and national identity in textbooks for international learners of chinese. *Cogent Education*, 3(1140361), 1–16. <http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1140361>

- Wasino, Putro, S., Aji, A., Kurniawan, E., & Shintasiwi, F. A. (2019). From assimilation to pluralism and multiculturalism policy: state policy towards ethnic chinese in indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 29(2), 213–223. <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i2.20869>
- Wood, M. (2013). *Sejarah resmi indonesia modern: versi orde baru dan para penantangannya*. Penerbit Ombak.
- Yulianti, I., Sumantri, Y. K., & Winarko, A. (2022). Enrichment materi pembelajaran sejarah tentang peranan peranakan arab pada masa pergerakan kemerdekaan. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.30197>